



**PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 48 TAHUN 2018**



**ANALISIS STANDAR BELANJA
KABUPATEN BIAK NUMFOR
TAHUN 2019**





BUPATI BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN BIAK NUMFOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BIAK NUMFOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Penyusunan Anggaran Berdasarkan Prestasi Kerja dilakukan berdasarkan Capaian Kinerja, Indikator Kinerja, Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga dan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan-Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam rangka mewujudkan anggarann yang efektif, efesien dan ekonomis perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Biak Numfor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten – kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);

4. Undang_undang.....

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Negara Republik Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
21. Peraturan Menteri.....

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2009 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2006 Nomor 30).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN BIAK NUMFOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Biak Numfor.
3. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah Atandar yang digunakan untuk menganalisis penilaian kewajaran beban kerja dan belanja yang dianggarkan yang dianggarkan dalam RKA Perangkat Daerah untuk melaksanakan suatu kegiatan.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, selaku pengguna anggaran/barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
6. Tim Anggaran.....

6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang diekapalai oleh Sekretaris Daerah dan Beranggotkan Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan, yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.
7. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
8. Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan barang Milik Daerah.
9. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai Pengurang nilai kekayaan bersih.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Deskripsi Kegiatan merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama. Persamaan perhitungan total belanja kegiatan merupakan metode yang digunakan untuk menghitung total belanja dari kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik.
14. Batasan alokasi rincian obyek belanja berisikan rincian obyek belanja yang diperkenankan untuk ditinggalkan pada RKA Perangkat Daerah, untuk tiap kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
15. Pengendali Belanja merupakan faktor-faktor yang memicu biaya/belanja dari suatu kegiatan yang dilakukan.
16. Satuan Pengendali Belanja tetap merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan suatu kegiatan.

BAB II
RUANG LINGKUP, MANFAAT DAN TUJUAN
ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 2

- 1) ASB dalam Peraturan Bupati ini hanya menentukan standar dalam penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan suatu kegiatan.
- 2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengatur standar dalam penilaian kewajaran beban kerja terhadap suatu kegiatan yang dianggarkan oleh Perangkat Daerah.

3) Penyusunan ASB.....

- 3) Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

- 1) ASB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) mempunyai kegunaan sebagai berikut:
 - a. Sebagai standar oleh TAPD untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan menentukan tingkat efisiensi dan ekonomi dari RKA Perangkat Daerah yang diusulkan.
 - b. Sebagai standar Penyusunan Plafon Anggaran Perangkat daerah.
 - c. Sebagai standar pada fungsi penyusunan anggaran (RKA Perangkat Daerah)
- 2) Sebagai standar Penyusunan Plafon Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka fungsi perencanaan Pemerintah Daerah dapat menggunakan ASB sebagai salah satu cara untuk memperkirakan jumlah rupiah plafon untuk tiap kegiatan yang tercantum pada Dokumen RKPD, KUA dan PPAS.
- 3) Sebagai standar pada fungsi Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka Dokumen ASB berguna sebagai pedoman dalam menyusun anggaran sehingga Perangkat daerah mempunyai kepastian dan aturan berkaitan dengan jenis belanja dan jumlah (besaran) rupiah yang diperkenankan untuk tiap-tiap kegiatan.

Pasal 4

- 1) Penerapan ASB bertujuan untuk:
 - a. menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas;
 - c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
- 2) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertujuan untuk pengendalian anggaran dalam rangka menjamin bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan ekonomis.

BAB III MUATAN ASB

Pasal 5

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari komponen yang meliputi:

- a. Deskripsi Kegiatan;
- b. Pengendali Belanja;
- c. Satuan Pengendali Belanja Tetap;
- d. Satuan Pengendali Belanja Variabel;
- e. Persamaan Rumus Penghitungan Total Belanja; dan
- f. Batasan Alokasi Objek Belanja.

Pasal 6

- 1) Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan pengertian, penjelasan detail operasional peruntukan dan batasan dari kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- 2) Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 3) Pemberian nama kegiatan yang dianggarkan dalam RKA Perangkat Daerah harus sesuai dengan batasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.

Pasal 8

- 1) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah.
- 2) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
- 3) Besarnya nilai belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan.

Pasal 9

Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.

Pasal 10.....

Pasal 10

- 1) Persamaan Rumus Penghitungan Total Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan yang termasuk dalam kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- 2) Jumlah total belanja yang dianggarkan untuk kegiatan yang termasuk dalam kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama tidak boleh melebihi dari total belanja yang dihasilkan dari persamaan perhitungan total belanja kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.
- 3) Contoh penggunaan persamaan perhitungan total belanja kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagaian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- 1) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan proporsi rincian objek belanja dari suatu kegiatan yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA Perangkat Daerah, untuk tiap kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- 2) Proporsi rincian obyek belanja yang diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prosentase rata-rata, batas bawah dan batas atas jumlah rupiah dari total belanja yang diperbolehkan untuk dianggarkan untuk tiap rincian belanja dari tiap kegiatan.
- 3) Batasan alokasi rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta prosentase sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 4) Rincian obyek tiap kegiatan yang dianggarkan dalam RKA Perangkat Daerah tidak boleh diluar dari rincian obyek belanja yang tercantum pada batasan alokasi rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat 1
- 5) Perangkat Daerah dapat menganggarkan rekening belanja diluar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- 6) Perangkat Daerah dapat menganggarkan melebihi prosentase jumlah rupiah yang diperkenankan untuk tiap rincian obyek, dengan syarat prosentase jumlah obyek belanja dan induk dari rincian obyek belanja tidak melebihi dari prosentase yang telah ditetapkan pada Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

7) Perangkat Daerah.....

- 7) Perangkat Daerah dapat menganggarkan melebihi prosentase jumlah rupiah yang diperkenankan untuk tiap rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan prosentase jumlah rupiah melebihi dari prosentase yang telah ditetapkan pada Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah mendapatn persetujuan dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB IV JENIS ASB

Pasal 12

- 1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB.
- 2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ASB 001 Pelatihan/Bimbingan Teknis Non-Pegawai Dalam Kota
 - b. ASB 002 Pelatihan/Bimbingan Teknis Non-Pegawai Luar Kota Dalam Daerah
 - c. ASB 003 Pelatihan/Bimbingan Teknis Non-Pegawai Magang Luar Daerah
 - d. ASB 004 Pelatihan/Bimbingan Teknis Pegawai Dalam Kota
 - e. ASB 005 Sosialisasi/Penyuluhan/Diseminasi Tatap Muka Dalam Kota
 - f. ASB 006 Sosialisasi/Penyuluhan/Diseminasi Tatap Muka Luar Kota Dalam Daerah
 - g. ASB 007 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
 - h. ASB 008 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Serta Penyusunan Lakip SKPD
 - i. ASB 009 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Distrik
 - j. ASB 010 Lomba/Kompetisi Perorangan
 - k. ASB 011 Pendataan/Survei
 - l. ASB 012 Evaluasi Program/Kegiatan
 - m. ASB 013 Pengawasan Pelaksanaan APB Kampung
 - n. ASB 014 Pembinaan Masyarakat
 - o. ASB 015 Penyelenggaraan Ujian Nasional/Sekolah
 - p. ASB 016 Rapat Koordinasi Dalam Daerah
 - q. ASB 017 Monitoring dan Evaluasi

3) ASB sebagaimana

- 3) ASB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dilakukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 14

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Biak Numfor.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- 1) Kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja, dan ketentuan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan pembahasan dengan TAPD.
- 2) Dalam hal terjadi perubahan harga yang tercantum pada Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, maka dilakukan penyesuaian indeks Analisis Standar Belanja yang besarnya ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- 3) Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, semua Peraturan Perundangan-undangan yang berkaitan dengan Standar Satuan Harga yang berlaku dilingkungan Pemerintah Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB VII

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak
Pada Tanggal 19 November 2018

Plt. BUPATI BIAK NUMFOR
WAKIL BUPATI
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

Diundangkan di Biak
Pada tanggal 19 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
MARKUS O. MANSNEBRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2018 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEMUEL RUMAIKEW, SH
NIP. 19730508 200112 1 004

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 48 TAHUN 2018
TANGGAL 19 NOPEMBER 2018

ASB-001

PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS NON PEGAWAI - DALAM KOTA

Deskripsi:

Pelatihan/bimbingan teknis non-pegawai dalam kota merupakan kegiatan untuk memberikan tambahan pengetahuan teknis **kepada masyarakat umum** dalam rangka meningkatkan kompetensi masyarakat dalam bidang tertentu, yang **diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah di dalam Ibu Kota Kabupaten Biak Numfor**. Kegiatan pelatihan ini tanpa memberikan fasilitas menginap kepada peserta.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari pelatihan/bimbingan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp562.722,00 per peserta, per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp562.722,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 1. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	B. Honorarium PNS	18,74%	48,32%
2	B. Bahan Pakai Habis	20,42%	65,32%
3	B. Jasa Kantor	3,68%	44,92%
4	B. Cetak & Penggandaan	5,56%	32,76%
5	B. Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8,97%	31,58%
6	B. Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,51%	4,12%
7	B. Sewa Sarana Mobilitas	2,59%	11,21%
8	B. Makan & Minum	25,58%	52,04%
9	B. Perjalanan Dinas	4,56%	38,86%
10	Honorarium Non PNS	9,38%	46,70%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan **Belanja Barang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat**. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan **Belanja Barang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat**, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS NON PEGAWAI – LUAR KOTA DALAM DAERAH

Deskripsi:

Pelatihan/bimbingan teknis non-pegawai luar kota dalam daerah merupakan kegiatan untuk memberikan tambahan pengetahuan teknis **kepada masyarakat umum** dalam rangka meningkatkan kompetensi masyarakat dalam bidang tertentu, yang **diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah di luar Ibu Kota Kabupaten Biak Numfor (tetapi masih dalam lingkup daerah Kabupaten Biak Numfor)** dengan peserta dari Kabupaten Biak Numfor.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelatihan/bimbingan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp567.333,00 per peserta, per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp567.333,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 002. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	B. Honorarium PNS	29,24%	44,65%
2	B. Bahan Pakai Habis	6,45%	10,00%
3	B. Cetak & Penggandaan	5,99%	8,97%
4	B. Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4,54%	9,88%
5	B. Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,26%	1,30%
6	B. Makan & Minum	20,23%	31,42%
7	B. Perjalanan Dinas	29,42%	52,31%
8	Honorarium Non PNS	3,86%	12,09%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan **Belanja Barang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat dan Belanja Sarana Mobilitas**. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan **Belanja Barang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat dan Belanja Sarana Mobilitas**, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS NON PEGAWAI – MAGANG LUAR DAERAH

Deskripsi:

Pelatihan/Bimbingan Teknis Non-Pegawai Magang Luar Daerah merupakan kegiatan untuk memberikan tambahan pengetahuan teknis **kepada masyarakat umum** dalam rangka meningkatkan kompetensi masyarakat dalam bidang tertentu, yang **diselenggarakan oleh lembaga pelatihan tertentu di luar daerah dengan peserta dari Kabupaten Biak Numfor.**

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelatihan/bimbingan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp1.862.987,00 per peserta, per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp1.862.987,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 003. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	B. Bahan Pakai Habis	0,11%	0,15%
2	B. Bahan Material	0,53%	0,62%
3	B. Cetak & Penggandaan	1,40%	1,80%
4	B. Sewa Sarana Mobilitas	3,46%	4,19%
5	B. Makan & Minum	2,51%	7,54%
6	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1,03%	3,09%
7	B. Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,84%	2,51%
8	B. Perjalanan Dinas	90,12%	95,92%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan **Belanja untuk Biaya Kontribusi Magang**. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan **Belanja untuk Biaya Kontribusi Magang**, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS PEGAWAI – DALAM KOTA

Deskripsi:

Pelatihan/bimbingan teknis pegawai dalam kota merupakan kegiatan untuk memberikan tambahan pengetahuan teknis **kepada pegawai** untuk **meningkatkan kompetensi teknis** pegawai dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan, yang **diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah di dalam Ibu Kota Biak Numfor**.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelatihan/bimbingan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp682.500,00 per peserta, per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp682.500,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 4. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	B. Honorarium PNS	34,15%	54,34%
2	B. Bahan Pakai Habis	4,55%	8,15%
3	B. Cetak & Penggandaan	5,85%	22,67%
4	B. Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10,12%	27,38%
5	B. Sewa Sarana Mobilitas	2,34%	14,00%
6	B. Makan & Minum	21,96%	38,13%
7	B. Perjalanan Dinas	20,42%	34,06%
8	Honorarium Non PNS	0,61%	4,88%
	Jumlah	100,00%	

SOSIALISASI/PENYULUHAN/DISEMINASI – TATAP MUKA DALAM KOTA

Deskripsi:

Sosialisasi/penyuluhan/diseminasi tatap muka dalam kota merupakan kegiatan untuk **memperkenalkan** program, produk, peraturan, atau lainnya kepada pegawai dan/atau non-pegawai (masyarakat) melalui kegiatan **tatap muka secara langsung**, yang **diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah di dalam Ibu Kota Kabupaten Biak Numfor**.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari sosialisasi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp474.775,00 per peserta, per hari sosialisasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp474.775,00 x jumlah peserta x jumlah hari sosialisasi)

Tabel 5. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	B. Honorarium PNS	24,88%	78,51%
2	B. Bahan Pakai Habis	13,62%	45,51%
3	B. Cetak & Penggandaan	7,37%	20,07%
4	B. Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6,31%	26,18%
5	B. Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,51%	5,51%
6	B. Sewa Sarana Mobilitas	2,62%	13,32%
7	B. Makan & Minum	24,16%	36,64%
8	B. Perjalanan Dinas	11,00%	68,18%
9	Honorarium Non PNS	9,53%	49,00%
	Jumlah	100,00%	

SOSIALISASI/PENYULUHAN/DISEMINASI – TATAP MUKA LUAR KOTA DALAM DAERAH

Deskripsi:

Sosialisasi/penyuluhan/diseminasi tatap muka luar kota dalam daerah merupakan kegiatan untuk **memperkenalkan** program, produk, peraturan, atau lainnya kepada pegawai dan/atau non-pegawai (masyarakat) melalui kegiatan **tatap muka secara langsung**, yang **diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah di luar Ibu Kota Kabupaten Biak Numfor (tetapi masih dalam lingkup daerah Biak Numfor)** .

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari sosialisasi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp516.500,00 per peserta, per hari sosialisasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp516.500,00 x jumlah peserta x jumlah hari sosialisasi)

Tabel 6. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	B. Honorarium PNS	16,61%	38,63%
2	B. Bahan Pakai Habis	16,67%	51,18%
3	B. Bahan Material	0,62%	2,47%
4	B. Cetak & Penggandaan	3,38%	6,04%
5	B. Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,53%	3,12%
6	B. Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,35%	1,40%
7	B. Makan & Minum	14,73%	25,40%
8	B. Perjalanan Dinas	39,28%	88,63%
9	Honorarium Non PNS	6,82%	18,82%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan **Belanja Barang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat dan Belanja Sarana Mobilitas**. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan **Belanja Barang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat dan Belanja Sarana Mobilitas**, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD

Deskripsi:

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah untuk menyusun laporan keuangan pada SKPD-nya atas kegiatan selama satu periode tahun anggaran.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah kegiatan SKPD dalam satu tahun

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp726.190,00 per kegiatan SKPD

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= R0,00 + (Rp726.190,00 x jumlah kegiatan SKPD)

Tabel 7. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Uang Lembur	48,69%	100,00%
2	B. Bahan Pakai Habis	24,97%	100,00%
3	B. Cetak & Penggandaan	17,49%	100,00%
4	B. Makan & Minum	8,85%	35,75%
	Jumlah	100,00%	

PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SERTA PENYUSUNAN LAKIP SKPD

Deskripsi:

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja serta penyusunan Lakip SKPD merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah untuk menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja ataupun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di SKPD masing-masing.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah kegiatan SKPD dalam satu tahun

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp750.000,00 per kegiatan SKPD

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= R0,00 + (Rp750.000,00 x jumlah kegiatan SKPD)

Tabel 8. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Uang Lembur	44,75%	100,00%
2	B. Bahan Pakai Habis	27,21%	100,00%
3	B. Cetak & Penggandaan	9,48%	30,00%
4	B. Makan & Minum	18,55%	52,63%
	Jumlah	100,00%	

PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DISTRIK

Deskripsi:

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Distrik merupakan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mendukung kegiatan musyawarah pembangunan pada tingkat distrik.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah desa/kampung

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per desa/kampung

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp2.116.667,00 per desa/kampung

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= R0,00 + (Rp2.116.667,00 x jumlah desa/kampung)

Tabel 9. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	B. Honorarium PNS	2,10%	11,38%
2	B. Bahan Pakai Habis	8,34%	12,57%
3	B. Cetak & Penggandaan	0,64%	1,53%
4	B. Makan & Minum	49,79%	85,90%
5	B. Perjalanan Dinas	39,13%	60,94%
	Jumlah	100,00%	

ASB-010
LOMBA/KOMPETISI PERORANGAN

Deskripsi:

Lomba/Kompetisi Perorangan merupakan kegiatan penyelenggaraan perlombaan dengan kriteria umum perorangan yang bisa diberlakukan untuk setiap golongan ataupun tingkatan, dan diselenggarakan oleh SKPD di dalam daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta lomba, jumlah hari perlombaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp883.440,00 per jumlah peserta lomba per jumlah hari perlombaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp883.440,00 x jumlah peserta lomba x jumlah hari perlombaan)

Tabel 010. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	B. Honorarium PNS	2,26%	6,79%
2	B. Honorarium Non PNS	14,07%	42,20%
3	B. Bahan Pakai Habis	7,49%	9,56%
4	B. Bahan Material	1,81%	5,43%
5	B. Cetak & Penggandaan	1,04%	1,63%
6	B. Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7,13%	18,13%
7	B. Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,82%	2,47%
8	B. Sewa Sarana Mobilitas	5,32%	13,66%
9	B. Makan & Minum	29,18%	52,68%
10	B. Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	9,76%	29,27%
11	B. Perjalanan Dinas	21,12%	63,37%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan Belanja Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. Dengan demikian, jika kegiatan ini memerlukan Belanja Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Deskripsi:

Pendataan/Survei merupakan kegiatan pengumpulan data atau pemutakhiran data yang **dilakukan oleh organisasi perangkat daerah tanpa melibatkan jasa pihak ketiga**. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran obyek tertentu, dimulai dari persiapan hingga diserahkannya laporan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah anggota tim, durasi kegiatan dalam hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp1.464.839,00 per anggota, per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp1.464.839,00 x jumlah anggota tim x jumlah hari)

Tabel 11. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	B. Honorarium PNS	1,73%	10,35%
2	Honorarium Pegawai Honorar	13,65%	81,88%
3	B. Bahan Pakai Habis	7,19%	22,98%
4	B. Cetak & Penggandaan	2,70%	8,28%
5	B. Makan & Minum	12,52%	59,71%
6	B. Perjalanan Dinas	54,57%	97,33%
7	Honorarium Non PNS	7,64%	45,83%
	Jumlah	100,00%	

ASB-012
EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN

Deskripsi:

Evaluasi program/kegiatan merupakan kegiatan untuk mengevaluasi sebuah program/ kegiatan SKPD. Kegiatan ini akan menghasilkan laporan rinci atas program/kegiatan dari Organisasi Perangkat Daerah yang dievaluasi dan rekomendasi berupa kemungkinan pembenahan atau perbaikan dari program/kegiatan tersebut .

Pengendali belanja (*cost driver*):

jumlah personil, jumlah waktu pelaksanaan dalam hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp727.619,00 per personil, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp727.619,00 x per personil x per hari)

Tabel 12. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	B. Honorarium PNS	17,46%	24,06%
2	B. Bahan Pakai Habis	11,03%	26,40%
3	B. Jasa Kantor	2,80%	8,40%
4	B. Cetak & Penggandaan	4,07%	7,39%
5	B. Makan & Minum	18,56%	36,50%
6	B. Perjalanan Dinas	46,08%	60,86%
	Jumlah	100,00%	

PENGAWASAN PELAKSANAAN APB KAMPUNG

Deskripsi:

Pengawasan Pelaksanaan APB Kampung merupakan merupakan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mendukung pelaksanaan APB kampung.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah kampung

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per desa/kampung

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp1.928.571,00 per kampung

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= R0,00 + (Rp1.928.571,00 x jumlah kampung)

Tabel 13. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	B. Bahan Pakai Habis	12,66%	22,35%
2	B. Cetak & Penggandaan	1,54%	4,90%
3	B Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,00%	8,00%
4	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,90%	15,60%
5	B. Makan & Minum	34,46%	60,00%
6	B. Perjalanan Dinas	45,44%	89,50%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan Belanja Sewa Sarana Mobilitas. Dengan demikian, jika kegiatan ini memerlukan Belanja Sewa Sarana Mobilitas maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

ASB-014
PEMBINAAN MASYARAKAT

Deskripsi:

Pembinaan Masyarakat merupakan kegiatan SKPD untuk meningkatkan kualitas masyarakat dengan memberikan bimbingan, bantuan pengetahuan, ataupun saran dengan cara berinteraksi langsung dengan masyarakat yang dibina

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta yang dibina, durasi kegiatan dalam hari.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp550.000,00 per jumlah peserta yang dibina per durasi kegiatan dalam hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp550.000,00 x jumlah peserta yang dibina x durasi kegiatan dalam hari)

Tabel 014. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	B. Honorarium PNS	21,70%	47,44%
2	B. Bahan Pakai Habis	10,45%	28,72%
3	B. Jasa Kantor	5,56%	27,79%
4	B. Cetak & Penggandaan	7,11%	19,18%
5	B. Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5,02%	10,42%
6	B. Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,96%	6,95%
7	B. Sewa Sarana Mobilitas	4,48%	18,76%
8	B. Makan & Minum	25,38%	42,81%
9	B. Perjalanan Dinas	18,34%	70,91%
	Jumlah	100,00%	

PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL/SEKOLAH

Deskripsi:

Penyelenggaraan ujian nasional/sekolah adalah kegiatan yang dilakukan oleh dinas pendidikan dalam rangka pelaksanaan ujian nasional/sekolah. Pada kegiatan ini mencakup pembuatan soal, penggandaan soal, pengawasan, koreksi ujian dan melaporkan nilai ujian.

Pengendali belanja (*cost driver*):

jumlah peserta ujian, jumlah hari pelaksanaan ujian.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp28.081,00 per peserta ujian per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0 + (Rp28.081,00 x jumlah peserta ujian x jumlah hari ujian)

Tabel 15. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	B. Honorarium PNS	4,88%	5,42%
2	B. Bahan Pakai Habis	3,12%	3,19%
3	B. Jasa Kantor	0,82%	1,64%
4	B. Cetak & Penggandaan	45,85%	52,64%
5	B. Sewa Sarana Mobilitas	1,61%	2,19%
6	B. Makan & Minum	4,66%	6,21%
7	B. Perjalanan Dinas	35,96%	40,40%
8	Honorarium Non PNS	3,10%	6,20%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan B. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat. Dengan demikian, jika kegiatan ini memerlukan B. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

ASB-016
RAPAT KOORDINASI DALAM DAERAH

Deskripsi:

Rapat Koordinasi merupakan kegiatan komunikasi satuan kerja perangkat daerah terhadap instansi terkait dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh kesepahaman yang dilaksanakan di Ibu Kota Biak Numfor.

Pengendali belanja (*cost driver*):

jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp222.904,00 per peserta per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0 + (Rp222.904,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 16. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	B. Honorarium PNS	8,52%	9,02%
2	B. Bahan Pakai Habis	9,83%	13,01%
3	B. Cetak & Penggandaan	3,13%	5,72%
4	B. Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5,37%	10,74%
5	B. Sewa Sarana Mobilitas	14,85%	27,12%
6	B. Makan & Minum	40,25%	46,13%
7	Honorarium Non PNS	18,04%	36,09%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan Belanja Untuk Narasumber yang Berasal Dari Luar Daerah dan Belanja Perjalanan Dinas. Dengan demikian, jika kegiatan ini memerlukan Belanja Untuk Narasumber yang Berasal Dari Luar Daerah dan Belanja Perjalanan Dinas maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

ASB-017 MONITORING DAN EVALUASI

Deskripsi:

Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan untuk memonitor dan mengevaluasi obyek amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik. Monev ini hanya ditujukan untuk kegiatan monev meja

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, waktu Pelaksanaan dalam hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp392.052,00 per peserta, per hari.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp392.052,00 x per peserta x per hari)

Tabel 017. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	B. Honorarium PNS	8,65%	15,39%
2	Uang Lembur	2,22%	8,89%
3	B. Bahan Pakai Habis	19,60%	28,76%
4	B. Bahan Material	0,77%	3,07%
5	B. Jasa Kantor	0,14%	0,58%
6	B. Cetak & Pengandaan	26,69%	39,16%
7	B. Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,01%	6,63%
8	B. Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,73%	3,86%
9	B. Sewa Sarana Mobilitas	1,53%	4,64%
10	B. Makan & Minum	35,66%	58,05%
	Jumlah	100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan Belanja Untuk Kegiatan Monev Lapangan. Dengan demikian, jika kegiatan ini memerlukan Belanja Untuk Kegiatan Monev Lapangan maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Plt. BUPATI BIAK NUMFOR
WAKIL BUPATI
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEMUEL RUMAIKEW, SH
NIP. 19730508 200112 1 004